

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Mustafa dkk, 2010).

Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Adriani, 2010).

Kebermanfaatan informasi merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat. Disebutkan dalam bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau sama dengan kata lain, informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial Negara (Suwardjono, 2012:101). Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu, juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2002:104).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Zuliarti, 2012).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1 (Paragraf 38) dinyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Oleh karena itu, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*).

Demi terselenggaranya keterandalan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja yang tepat, untuk mengisi berbagai kedudukan, jabatan, masa kerja persyaratan jabatan kepegawaian dan kepangkatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional (Hullah, dkk., 2012).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pasal 1 disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 1 (2) menyebutkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian Indriasari dan Ertambang (2008), menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian tentang keterandalan pelaporan keuangan daerah diantaranya dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008). Penelitian ini menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap, nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh positif, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.

Hullah, dkk. (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasilnya menyatakan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Hasil penelitiannya menemukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, demikian juga halnya pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keterandalan pelaporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Selain itu sumber daya manusia yang baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat, terdapat hal yang lebih penting yaitu pengendalian internal.

Dengan mempertimbangkan penelitian Indriasari dan Ertambang (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dan Hullah, dkk.(2012), penelitian ini bermaksud melanjutkan penelitian tersebut. Akan tetapi,

penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di wilayah Eks Karisidenan Surakarta pada tahun 2013 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di waktu dan wilayah yang berbeda. Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang penelitian ini, maka penelitian ini mengambil judul **PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (studi Empiris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Dapat mengetahui pentingnya sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan peranan pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah terutama yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk memberikan informasi kepada para mahasiswa mengenai keterandalan pelaporan keuangan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain: Laporan keuangan daerah, pelaporan keuangan daerah, keterandalan pelaporan keuangan daerah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis dan objek penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji kualitas data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan data, analisis data dan pembahasan untuk dukungan hipotesis yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.